

Keseimbangan

Pembangunan Aceh¹

The Balance of Aceh Development

**BIDANG KAJIAN APARATUR
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LAN²**

ABSTRAK

Pembangunan antar kabupaten dan kota di Aceh belum terjadi secara merata. Demikianlah kesimpulan dari kajian tim PKP2A LAN. Melalui analisis data tertulis dari BPS, dan telaahan data hasil wawancara dan FGD dari *study* lapangan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota, ditemukan bahwa ketimpangan pembangunan di Aceh dapat dilihat dari pertumbuhan nilai PDRB perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak merata dan berimbang. Penyebabnya karena perbedaan potensi sumberdaya alam masing-masing daerah, produksi daerah tidak fokus dan sesuai dengan potensi SDA daerah, konsentrasi tenaga kerja produkti fpada daerah yang relatif lebih maju. Kajian ini merekomendasikan perlunya pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan pengeluaran daerah yang fokus pada sektor potensi ekonomi yang dimiliki, dan kerjasama pembangunan yang terintegrasi antar daerah.

KATA KUNCI

Keseimbangan, Pembangunan, Ekonomi, Daerah Kab/Kota.

491

ABSTRACT

The development between districts and cities in Aceh has not spread evenly. Thus is the conclusion of Research Team of PKP2A IV LAN. Through written data analysis from Central Statistic Board (BPS) of Aceh Province, interview-based research paper, and Focus Group Discussion (FGD) during field study in ten areas, found that unbalanced development of Aceh can be seen from the growth of PDRB value per capita and the growth of economy between unbalanced and unequal areas. It is caused by disparity of natural resources in each area, the production level in each area is not focus and irrelevant with local natural resources, and the concentration of labours are more relatively in developed areas. This research recommends that the Government need to formulate policies towards local expense that focus on local economy sources and integrated development cooperation between areas.

KEY WORDS

Balance, Development, Economy, District/City Area

¹Naskah diterima 18 Maret. Revisi 8 April 2013.

²Naskah ini ditulis ulang oleh Edy Saputra (Bidang Kajian Aparatur PKP2A IV-LAN) dari hasil Kajian Keseimbangan Pembangunan Aceh. Email: edysaputra.lan@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi merupakan peluang bagi daerah untuk mengaktualisasi kewenangan dan kemandiriannya dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah secara optimal untuk kesejahteraan penduduknya, namun demikian adanya pemaknaan dan penerapan konsep otonomi daerah sebagai sebuah kebebasan dan kewenangan yang luas bagi daerah dalam mengeksploitasi potensi-potensi daerah yang dimiliki, secara tidak langsung telah menciptakan kesenjangan pembangunan antar daerah, bagi daerah yang kaya dan memiliki struktur yang lebih seimbang biasanya cenderung akan melaju lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang miskin potensi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah dialami oleh sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Aceh. Kesenjangan pembangunan di Aceh, ditandai dengan belum optimalnya hasil-hasil pembangunan kepada peningkatan kesejahteraan penduduk. Indikasi kesenjangan pembangunan antar daerah di Aceh antara lain terlihat dari perbedaan perkembangan nilai PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2010. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita kabupaten dan kota di Aceh dari 2005 hingga 2010 yang tertinggi adalah Kota Banda Aceh sebesar 13,71 persen setiap tahunnya. Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata-rata hanya tumbuh sebesar -2,68 persen setiap tahunnya (PKP2A IV LAN, 2010)

Kemudian ketidakseimbangan pembangunan juga dapat ditelaah dari aspek tingkat kemiskinan antar kabupaten

menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi merupakan daerah yang berada di kabupaten-kabupaten yang lebih terpencil, sementara wilayah-wilayah sekitar Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan paling rendah (Bank Dunia. 2008).

Dari uraian di atas bahwa perkembangan pembangunan antar daerah kabupaten/kota di Aceh belum terjadi secara merata. Lebih lanjut dalam tulisan ini menguraikan kesenjangan pembangunan Aceh dari aspek pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Aceh, dan menganalisis tingkat keseimbangan pembangunan antar daerah di Aceh. Kemudian tulisan ini mencoba merekomendasikan kebijakan pembangunan Aceh. Diharapkan tulisan ini menjadi referensi bagi pemerintah Aceh dalam menyusun pola pembangunan Aceh ke depan secara merata, seimbang dan terintegrasi, dan bagi Pemerintah Kab/Kota diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan yang saling terintegrasi antar daerah.

B. LANDASAN TEORI

Pembangunan Daerah

Pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. " *Development is not a static concept. It is continuously changing*", artinya juga bisa dikatakan bahwa pembangunan itu sebagai " *never ending goal*". (Rahmaddin MY. 2009). Pembangunan terjadi pada skala nasional dan daerah. Untuk konteks pembangunan di daerah, Lincoln Arsyad (1997) mendefinisikan pembangunan daerah sebagai sebuah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola

sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk merangsang perkembangan ekonomi di wilayah. Masih menurut Arsyad (1997) bahwa keadaan sosial ekonomi yang berbeda disetiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Dengan demikian perbedaan tingkat pembangunan antar daerah akan mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah.

Berkembang dan tidak berkembangnya pembangunan di suatu daerah sangat terkait dengan adanya pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi yang ada disuatu daerah. Bagi daerah yang mempunyai sumber daya yang memadai dan didukung dengan pengelolaan yang baik, serta pemusatan ekspansi ekonomi di daerah tersebut, sangat memungkinkan akan cepat lebih maju dengan daerah yang potensi ekonomi dan sumber daya alamnya kurang memadai.

Dalam pengembangan ekonomi (economic development), ada tiga parameter yang dapat dilihat untuk menilai kinerja pemerintah daerah, yakni: pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Artinya, mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi di daerah. Juga dilihat bagaimana upaya pemerintah daerah memeratakan distribusi ekonomi hingga ke pelosok-pelosok. Dengan demikian, pembangunan tidak terhenti di pusat kabupaten-kota saja. Terkait pemberdayaan ekonomi, berkaitan dengan program/kebijakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi dan menyiasati keterbatasan ekonomi

lokal. Semakin terintegrasi upaya macu pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi lokal, nilai daerah semakin tinggi.

Salah satu komponen yang penting diperhatikan dan diarahkan mempercepat pembangunan daerah adalah dengan mengembangkan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*), yaitu dengan mengembangkan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah untuk meningkatkan derajat kemajuan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, strategi mengembangkan ekonomi masyarakat diharapkan tepat dan mampu menemukan dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing (*knowledge based economy*) sekaligus berbasis sumberdaya lokal (*resource based economy*) baik melalui pemerintah daerah, sektor swasta dan kelembagaan/organisasi yang berbasis masyarakat setempat.

Keseimbangan Pembangunan

Istilah pembangunan seimbang mulai populer pada zaman industrialisasi di eropa selatan dan tenggara (1953). Konsep pembangunan melalui industrialisasi secara besar-besaran di daerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan daerah agar lebih cepat daripada di daerah yang lebih kaya (Rosenstein-Rodan. 1953). Namun demikian konsep pembangunan seimbang yang menepatkan upaya industrialisasi secara besar-besaran, disatu sisi telah melemahkan perkembangan pada sektor yang lain yaitu pertanian (lewis). Oleh karena itu teori pembangunan

seimbang ala industrialisasi harus diperluas sehingga meliputi juga usaha pembangunan secara besar-besaran di sektor pertanian. Dengan demikian kenaikan produktivitas dan produksi sektor pertanian akan dapat memenuhi kenaikan permintaan sektor industri.

Lebih lanjut Lewis mengatakan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian, dalam hal ini dia mencontohkan hubungan dua sektor ekonomi yang saling terkait dalam menciptakan pembangunan yang seimbang yaitu dengan asumsi bahwa jika sektor industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan kerja, begitu juga sebaliknya jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian juga akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi, akhirnya jika sektor pertanian tidak berkembang maka sektor industri-pun tidak akan berkembang, dan keuntungan sektor industri juga kecil. Pendapat senada tentang pertumbuhan ekonomi harus berlangsung secara serentak di semua sektor, yang berarti terjadi pembangunan berimbang antara industri manufaktur dan pertanian di kemukakan oleh CP Kindleberger, dalam ML. Jhingan.(1993)

Dengan demikian dalam lingkup yang lebih luas Pembangunan seimbang juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan pembangunan di berbagai sektor. Singkatnya. teori pembangunan seimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi

sehingga semua sektor tumbuh bersama, dengan pertimbangan akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan dipusatkan pada satu sektor industri saja. Ketiadaan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terlambat.

Pendapat yang berbeda terhadap pembangunan seimbang adalah pembangunan tak seimbang yang diperkenalkan oleh Hirschman. Dasar analisis yang digunakan adalah tidak relevan bila pembangunan seimbang dan merata untuk semua sektor ekonomi, hal ini sangat terkait dengan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki daerah daerah adalah berbeda. Oleh karena itu konswekwensinya adalah harus ada skala prioritas sektor apa yang harus didahulukan di kembangkan, yang disesuaikan dengan modal dan sumber daya yang tersedia dan signifikan dikelola. Dia memusatkan perhatiannya bahwa dalam pembangunan tak seimbang tersebut penting diarahkan kepada sektor prasana dan sektor produktif, dimana dapat mendorong pengembangan proyek-proyek pembangunan yang lainnya di masa mendatang.

Kedua konsep teori dimuka jika dianalisis lebih jauh, walaupun memiliki pendekatan yang berbeda, namun akan ditemukan bahwa intinya adalah penyelenggaraan pembangunan baik yang seimbang maupun tidak seimbang adalah mempunyai goal yang sama yaitu berupaya mengali dan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah-daerah tersebut, yang muara akhirnya adalah terjadinya

kesejahteraan bagi rakyat di daerah-daerah tersebut.

Untuk menganalisis keseimbangan pembangunan antar daerah, dapat dilakukan analisis terhadap ketimpangan ekonomi antar daerah. Ketimpangan tersebut diantaranya dalam hal ketidakmerataan distribusi pendapatan. Dalam hal ini Thee Kian Wie (1982) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi :

1. Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan (*size distribution oncome*);
2. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*);
3. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*);

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan daerah (Williamson, 1956).

Ketimpangan pendapatan antar daerah, tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut, dimana terlihat pada nilai PDRB-nya. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima akan menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan (ketimpangan pendapatan) daerah tersebut

(Todaro, 1981). Todaro mengatakan ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara (baca. daerah) yang baru memulai pembangunan, dibandingkan dengan daerah-daerah maju.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan seluruh unit usaha, baik berupa barang maupun jasa, dalam suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada saat penghitungan (*current price*), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar (*constant price*). Tahun dasar yang ditetapkan dalam penghitungan PDRB saat ini adalah tahun 2000.

Data PDRB merupakan data statistik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dua kriteria kinerja ekonomi makro yang terkait dengan PDRB ialah laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor ekonomi. Untuk melihat pergeseran kontribusi sektor ekonomi dapat dilakukan dengan mengkaji PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dalam periode waktu tertentu menggunakan analisis terhadap PDRB atas dasar harga konstan.

Salah satu cara untuk melihat keberhasilan kebijakan ekonomi kabupaten/kota yaitu dengan melihat nilai dan pertumbuhan PDRB. Nilai PDRB menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, sedang-

kan pertumbuhan PDRB menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah. Peningkatan PDRB tergantung oleh 3 aktor yang berperan dalam perekonomian yaitu pemerintah, swasta, dan rumahtangga. Oleh sebab itu, keberhasilan ketiga aktor ini dapat dilihat dari nilai PDRB.

Nilai PDRB setiap kabupaten/kota pasti berbeda. Perbedaan ini disebabkan perbedaan kinerja yang dilakukan oleh ketiga aktor ekonomi. Perbedaan PDRB juga disebabkan adanya perbedaan sektor unggulan dalam pembentukan PDRB. Setiap daerah biasanya memiliki satu sektor unggulan dalam pembentuk nilai PDRB.

C. METODE KAJIAN

Kajian keseimbangan pembangunan Aceh adalah sebuah kajian diskriptif kualitatif yang menganalisis keseimbangan pembangunan daerah di Aceh dilihat dari aspek kesenjangan pendapatan, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Data yang digunakan terhitung periode 5 tahun yaitu 2006–2010. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa informasi dan pernyataan dari narasumber di 6 daerah kab/kota, dan data skunder berupa PDRB kab/kota di Aceh yang diperoleh dari BPS dan Bappeda serta hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan wawancara, FGD, dan telaahan literatur dan dokumen terkait. Data dalam bentuk pernyataan diinterpretasi yang kemudian disajikan dalam uraian naratif. Sedangkan data tertulis dianalisis menggunakan Indeks Williamson yaitu menganalisis seberapa besarnya kesenjangan pendapatan antar wilayah/daerah di Provinsi Aceh. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per

kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}}$$

CV_w = Indeks Williamson

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- i (jiwa)

n = Jumlah penduduk Aceh (jiwa)

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota ke- i (Rupiah)

\bar{y} = PDRB per kapita rata-rata Provinsi Aceh (Rupiah)

D. PEMBAHASAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN ACEH

Bagian ini menguraikan keseimbangan pembangunan Aceh dari aspek pertumbuhan PDRB pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekonomi, analisis Tipologi klasen, serta analisis Indeks Williamson.

Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Peningkatan ekonomi Kabupaten dan Kota di Aceh dapat ditelaah dari perkembangan Nilai PDRB Kab/Kota di Aceh dalam Tabel 1.

Tingkat perkembangan nilai PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan harga konstan berbeda-beda, namun secara umum perolehan nilai PDRB mengalami peningkatan untuk setiap kab/kota di Aceh. Nilai peningkatan PDRB terutama terjadi pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang lebih memadai, kecuali Kota Banda Aceh yang mengalami peningkatan sangat signifikan sejak tahun 2007 s/d 2010, hal ini antara lain disebabkan konsentrasi tenaga kerja

Tabel. 1
PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/ Kota	PDRB 2005	PDRB 2006	PDRB 2007	PDRB 2008	PDRB 2009	PDRB 2010
1	Simeulue	167	201	225	232	243	255
2	Aceh Singkil	659	402	421	441	462	485
3	Subulussalam	0	217	226	237	248	261
4	Aceh Selatan	1.092	1.130	1.161	1.203	1.249	1.302
5	Aceh Tenggara	407	612	655	692	728	767
6	Aceh Timur	1.381	1.425	1.491	1.529	1.576	1.635
7	Aceh Tengah	862	987	1.044	1.091	1.138	1.187
8	Bener Meriah	551	644	660	686	717	750
9	Aceh Barat	879	966	1.082	1.141	1.203	1.265
10	Aceh Besar	1.732	1.875	2.130	2.262	2.385	2.520
11	Pidie	1.577	1.462	1.502	1.570	1.637	1.709
12	Pidie Jaya	0	531	558	588	619	652
13	Bireuen	1.794	2.063	2.259	2.386	2.512	2.655
14	Aceh Utara	2.152	2.453	2.544	2.637	2.739	2.852
15	Aceh Barat Daya	529	556	582	608	635	667
16	Gayo Lues	287	359	582	391	410	431
17	Aceh Tamiang	1.045	1.050	1.075	1.096	1.126	1.161
18	Nagan Raya	788	822	867	898	930	968
19	Aceh Jaya	212	236	243	253	264	276
20	Banda Aceh	1.504	2.172	2.585	2.731	2.886	3.056
21	Sabang	133	201	216	225	236	248
22	Langsa	717	750	781	811	845	885
23	Lhokseumawe	1.491	1.652	1.852	2.065	2.081	2.204

dan perputaran ekonomi terjadi di pusat ibukota provinsi Aceh ini pada masa rehab rekon musibah gempa dan tsunami (2006).

Perolehan nilai tertinggi diantara kab/kota sejak 2005 s/d 2006 adalah Kab. Aceh Utara, sedangkan terendah adalah Kota Sabang pada 2005. Untuk tahun 2006, kota sabang kembali dan bersama-sama kabupaten Simeulu mengalami laju pertumbuhan PDRB yang terendah diantara 23 kab/kota di Aceh

yaitu sebesar Rp.201 Miliar. Pada tahun 2007 s.d 2010 laju pertumbuhan PDRB kota Banda Aceh mengalami peningkatan sangat signifikan, meninggalkan dominasi laju pertumbuhan yang pernah dialami oleh kab Aceh Utara dari tahun 2005 s/d 2006.

Laju Pertumbuhan ekonomi

Terjadinya perkembangan nilai PDRB yang besar belum tentu menunjukkan perbaikan laju pertumbuhan ekono-

mi. Laju pertumbuhan ekonomi kab/ Kota di Aceh setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 2 sbb:

nya untuk setiap kabupaten/kota. Tren laju pertumbuhan ekonomi ke 23 kab/kota tersebut diuraikan sebagai

Tabel. 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Periode 2005-2010
di Provinsi Aceh berdasarkan Nilai PDRB Harga Konstan 2000

No	Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)						Rata-rata
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Simeulue	0,60	20,36	11,94	3,11	4,74	4,94	7,62
2.	Aceh Singkil	3,78	-39,00	4,82	4,59	4,75	4,97	-2,68
3.	Aceh Selatan	6,05	3,42	2,73	3,63	3,81	4,27	3,99
4.	Aceh Tenggara	8,53	50,37	7,03	5,60	5,24	5,36	13,69
5.	Aceh Timur	4,86	3,19	4,63	2,56	3,09	3,71	3,67
6.	Aceh Tengah	10,37	14,45	5,82	4,55	4,27	4,32	7,30
7.	Bener Meriah	2,61	16,88	2,48	3,94	4,52	4,60	5,84
8.	Aceh Barat		9,90	11,98	5,46	5,43	5,21	4,14
9.	Aceh Besar	1,58	8,26	13,61	6,21	5,42	5,68	6,79
10.	Pidie	3,07	-7,29	2,71	4,52	4,27	4,42	1,95
11.	Pidie Jaya	0,00	0,00	5,08	5,38	5,27	5,33	5,27
12.	Bireuen	2,51	14,99	9,49	5,63	5,27	5,69	7,27
13.	Aceh Utara	-5,41	13,99	3,71	3,66	3,87	4,13	3,99
14.	Aceh Barat Daya	2,72	5,10	4,68	4,47	4,44	5,07	4,41
15.	Gayo Lues	4,36	25,09	62,04		4,77	5,19	11,45
16.	Aceh Tamiang	5,98	0,48	2,38	1,95	2,74	3,11	2,77
17.	Nagan Raya	-3,87	4,27	5,49	3,63	3,46	4,12	2,85
18.	Aceh Jaya		11,32	2,97	4,12	4,35	4,55	-1,11
19.	Subulussalam	0,00	0,00	4,23	4,86	4,60	5,29	4,75
20.	Banda Aceh	1,62	44,41	19,01	5,64	5,67	5,91	13,71
21.	Sabang	4,72	51,13	7,46	4,17	4,89	5,08	12,91
22.	Langsa	3,91	4,60	4,10	3,93	4,20	4,70	4,24
23.	Lhokseumawe	5,45	10,80	12,08	11,53	0,78	5,93	7,76

Sumber: dianalisis dari data BPS

Secara umum, nilai rata-rata persentase laju pertumbuhan ekonomi diseluruh kabupaten/kota selama periode 2005-2010 berbeda-beda. Karakteristik tren pertumbuhannya berfluktuasi, dengan sifatnya cenderung meningkat dan menurun setiap tahun-

berikut:

- a) Periode dari 2005 ke 2006 persentase laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi cenderung menurun, dialami oleh 5 (lima) daerah yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie dan

- Aceh Tamiang, selebihnya 16 daerah Kab/Kota mengalami fluktuasi meningkat (minus 2 daerah pemekaran Subussalam dan Pidie Jaya);
- b) Periode dari 2006 ke 2007 fluktuasi cenderung menurun dialami oleh 10 (sepuluh) daerah yaitu Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Jaya, Sabang, dan Banda Aceh;
 - c) Periode dari tahun 2007 ke 2008 fluktuasi yang cenderung meningkat hanya dialami oleh 5 (lima) daerah yaitu Aceh Selatan, Bener Meriah, Pidie Jaya, Aceh Jaya dan Subussalam, selebihnya 18 daerah mengalami persentase fluktuasi yang menurun;
 - d) Periode dari tahun 2008 ke 2009 Jumlah daerah yang mengalami persentase peningkatan dan menurun relatif berimbang, dengan perbandingan 11 kab/kota mengalami persentase laju pertumbuhan menurun, sedangkan 12 kab/kota mengalami peningkatan persentase laju pertumbuhan ekonomi daerahnya. 12 daerah yang mengalami persentase laju pertumbuhan ekonomi meningkat yaitu; Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Timur, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Subulussalam, Sabang, dan Langsa;
 - e) Untuk periode dari 2009 ke 2010, hanya satu daerah yang mengalami fluktuasi persentase laju pertumbuhan ekonomi menurun yaitu kabupaten Aceh Barat, selebihnya 22 kab/Kota mengalami tren persentase laju pertumbuhan ekonomi meningkat.

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 hingga 2010, maka rata-rata persentase laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kota Banda Aceh sebesar 13,71 persen setiap tahunnya, kemudian Aceh Tengah sebesar 13,69, setiap tahunnya, sedangkan Singkil merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata-rata hanya tumbuh sebesar -2,68 persen setiap tahunnya.

Uji Tipologi Klassen

Laju pertumbuhan PDRB perkapita tiap Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh tahun 2005-2010 yang berbeda-beda, menyebabkan munculnya perbedaan pola dan struktur ekonomi. Untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi setiap kabuten/kota tersebut, dilakukan uji Klassen (Tipologi Klassen). Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal atau *low growth and low income* (gambar 1). Berdasarkan hasil uji Tipology Klassen, selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi kab/kota di Aceh, dijabarkan dalam tabel 3 klasifikasi.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang berbeda-beda antar kabupaten/kota di Aceh. Dengan klasifikasinya bahwa terdapat beberapa kabu-

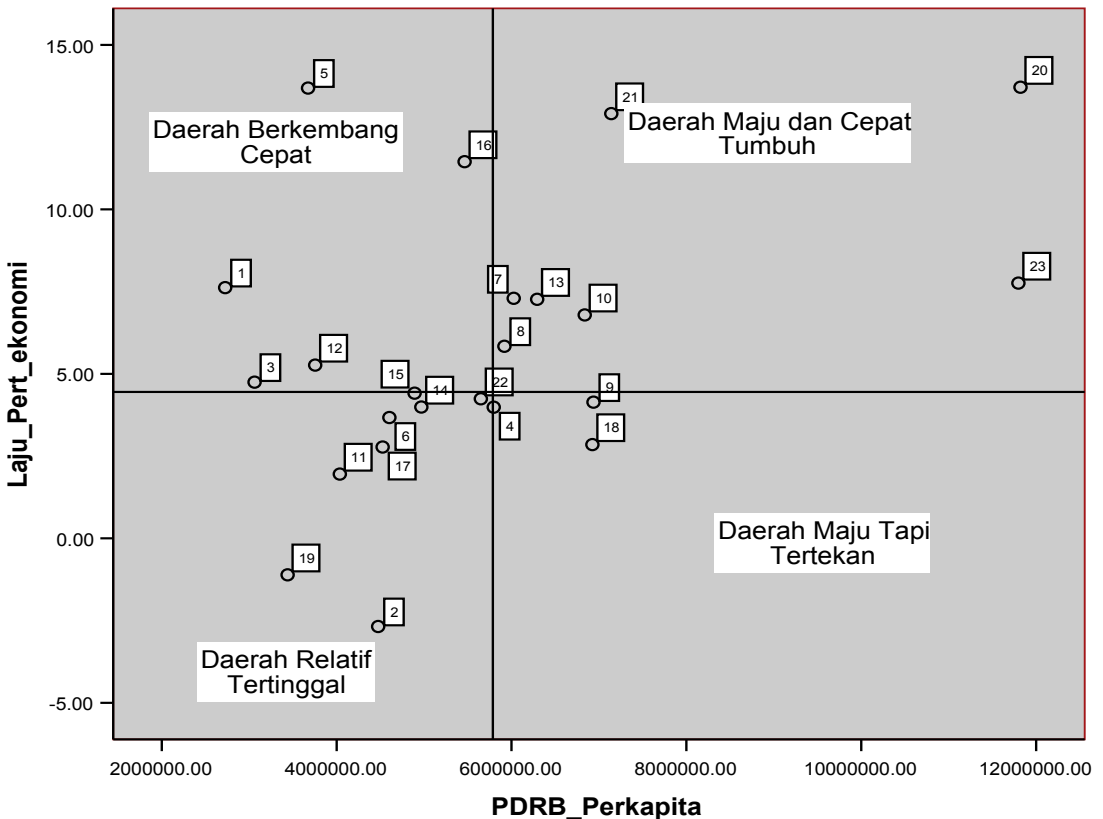
paten masuk ke dalam daerah berkembang, daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah cepat berkembang serta daerah relatif tertinggal. Uraian dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Untuk klasifikasi pertama, terdapat 7 (tujuh) daerah yang mengalami kondisi ekonomi Maju dan Cepat Tumbuh yaitu yaitu Kab. Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe. Ke-7 Daerah tersebut memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik, karena memiliki rata-rata pertumbuhan nilai PDRB perkapita tinggi, kemudian didukung

juga dengan laju pertumbuhan ekonomi yang baik juga;

- b) Untuk klasifikasi kedua, terdapat 5 (lima) daerah yang tergolong cepat tumbuh (berkembang) yaitu Kab. Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Gayo Lues, dan Kota Subulussalam. Ke-5 daerah tersebut memiliki kondisi laju pertumbuhan ekonomi tinggi, akan tetapi pertumbuhan nilai PDRB pendapatan perkapita rendah;
- c) Untuk klasifikasi ketiga, terdapat 3 (tiga) daerah yang tergolong maju tapi tertekan yaitu Kab. Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Ke-3 daerah ini memiliki rata-rat

Gambar 1 Hasil Analisis Klasen Hasil Analisis Tipologi Klasen



pertumbuhan PDRB pendapatan perkapita yang tinggi, akan tetapi mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang rendah. Karena pertumbuhan yang rendah dan tertekan, akan berpotensi daerah ini menjadi tertinggal dalam jangka panjang. Dengan kata lain bahwa PDRB yang tinggi tanpa dibarengi pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan ekonomi berjalan lambat yang pada akhirnya menurunkan kinerja ekonomi di daerah tersebut;

d) Untuk klasifikasi yang keempat, terdapat 8 (delapan) daerah yang relatif tertinggal adalah kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan Kota Langsa. Ke- 8 daerah ini memiliki pendapatan perkapita yang lebih rendah dari daerah lainnya, kemudian juga mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari daerah lainnya.

Tabel. 3
Klasifikasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Aceh periode 2005-2010

PDRB per Kapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh: Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Kab. Aceh Besar Kab. Bireuen Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe	Daerah Berkembang Cepat: Kab. Simeulue Kota Subulussalam Kab. Aceh Tenggara Kab. Pidie Jaya Kab. Gayo Lues
$r_i < r$	Daerah Maju Tapi Tertekan: Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Nagan Raya	Daerah Relatif Tertinggal: Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Timur Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Jaya Kota Langsa

Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh

Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Aceh dilihat dari kesenjangan pendapatan antar wilayah/daerah di Provinsi Aceh. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan pertumbuhan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB akan menyebabkan nilai PDRB perkapita menurun. Hal ini berarti semakin sedikit pendapatan yang diperoleh masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga turun.

Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan pendekatan Indeks Williamson. Dapat diperhatikan pada tabel 4.

Dari tabel indeks williamson diatas, didapati bahwa ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2005-2009 terus mengalami peningkatan, kemudian menurun pada tahun 2010. Nilai indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,41, kemudian menurun pada tahun 2010 yaitu 0,40. Kondisi dari tahun 2005 s/d 2009 menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh terus memburuk, kecuali tahun 2010. Ketimpangan ini terjadi akibat adanya perbedaan yang besar antar kemampuan ekonomi kabupaten/kota yang diukur dari nilai PDRB.

Faktor Penyebab keseimbangan pembangunan ekonomi antar Kab/Kota di Aceh

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam menciptakan kesenjangan pembanguana pada daerah kab/kota di Aceh, yaitu:

- 1) Perbedaan Sumber daya alam, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengelola SDA tersebut;
- 2) Realisasi investasi yang rendah dan terkonsentrasi pada daerah tertentu. Investasi cenderung berlaku di daerah kota yg telah berkembang karena adanya kepastian pasar;
- 3) Perbedaan kebijakan pemerintah dalam hal mengatur dan mengarahkan serta fokus pengeluaran belanja daerah. Pengeluaran yang kurang sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah ternyata tidak memberikan dorongan bagi produksi daerah. Sebagai contoh, daerah yang memiliki potensi pertanian tapi pengeluaran lebih diarahkan kepada sektor pariwisata, justru tidak menentukan stimulus ekonomi yang lebih baik;
- 4) Migrasi dan konstrasi tenaga kerja yang memiliki skill rata-rat terdidik dan produktif ke daerah-daerah yang perkotaan berkembang, sebagai contoh, migrasi penduduk ke Kota Banda Aceh menyebabkan ketersediaan SDM di Banda Aceh lebih mampu mengelola sumber daya yang ada untuk menjalankan perekonomian. Kondisi ini menyebakan produksi ekonomi Kota Banda Aceh tinggi dan cenderung meningkat tajam. Kondisi inilah yang membuat Kota Banda Aceh masuk dalam kategori maju dan cepat tumbuh dalam pengujian Klassen.

Mengurangi Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh

Kondisi ketimpangan pembangunan yang dihadapi kabuapten/kota di Provinsi Aceh memiliki potensi perma-

Tabel 4
Indeks Ketimpangan Pembangunan Daerah Aceh 2005-2010

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010
CVw	0,31	0,34	0,37	0,40	0,41	0,40

Sumber: Data hasil analisis tim Kajian PKP2A IV LAN

salah yang cukup besar khususnya dalam jangka panjang. Ketimpangan yang terus terjadi dan semakin besar akan menimbulkan kecemburuan antar daerah. Permasalahan ini yang dikhawatirkan menjadi pemicu keinginan adanya pemekaran provinsi. Dalam jangka panjang, permasalahan migrasi penduduk ke wilayah yang maju akan menyebabkan munculnya daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi sehingga dikhawatirkan muncul permasalahan-permasalahan sosial.

Dengan demikian, maka diperlukan perbaikan kebijakan ekonomi dan kependudukan. Kebijakan sektor ekonomi dapat ditempuh melalui;

- 1) Peningkatan nilai PDRB masing-masing daerah diarahkan melalui spesialisasi dan fokus pada sektor-sektor ekonomi tertentu yang terbukti telah berkontribusi pada pembentukan nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Upaya ini didasarkan pada potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang diambil harus mampu mendorong peningkatan nilai sektor unggulan ekonomi;
- 2) Pembanguna yang saling terintegrasi antar kabupaten dan kota, yang memiliki fungsi kawasan yang sama;
- 3) Pemerintah daerah kabupaten dan kota perlu menjalin kemitraan de-

ngan dunia usaha menarik dan meningkatkan investasi di sektor pertanian;

- 4) perlu menciptakan pemerataan lapangan kerja di daerah-daerah kabupaten dan kota yang kurang berkembang, hal ini untuk menghindari konsentrasi tenaga kerja yang terdidik (mempunyai skill) di satu daerah yang maju saja.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aceh sebagai daerah dengan otonomi khususnya, memiliki kemandirian dan kewenangan untuk mengelola kekayaan sumber daya alam untuk kemajuan pembangunan daerah. Akan tetapi, perbedaan potensi SDA dan sistem pengelolaan oleh setiap daerah, rendahnya rencana dan realisasi investasi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, terkonsentrasinya investasi pada daerah-daerah yang sudah relatif maju, serta migrasi konsentrasi tenaga kerja produktif yang memiliki skill memadai pada daerah-daerah yang relatif maju, menyebabkan pembangunan yang terjadi antar daerah kab/kota belum merata dan seimbang. Ketidakseimbangan pembangunan terlihat dari ketimpangan pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Aceh dan laju pertumbuhan ekonomi antar kab/kota (periode 2005-2010).

Nilai PDRB Kab/Kota selama periode 2005-2010 berfluktuasi dan cende-

rung meningkat. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita, Kota Banda Aceh sebesar 13,71 persen setiap tahunnya adalah daerah yang mengalami peningkatan tertinggi, Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata-rata hanya tumbuh sebesar -2,68 persen setiap tahunnya.

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2005-2010 terus mengalami peningkatan walalupun menurun pada tahun 2010. Nilai indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,41 walapun berhasil turun sedikit menjadi 0,40 di tahun 2010. Hal ini membuktikan semakin memburuk mengingat adanya pertumbuhan nilai ketimpangan setiap tahunnya kecuali tahun 2010.

Kemudian hasil uji Klassen menyimpulkan bahwa dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sebanyak 7 kabupaten/kota masuk dalam kategori Daerah Maju dan Cepat Tumbuh; 5 (lima) daerah masuk dalam kategori Daerah Berkembang Cepat; 3 (tiga) kabupaten masuk dalam kategori Daerah Maju Tapi Tertekan; dan 8 (delapan) kab/kota masuk dalam kategori Daerah Tertinggal.

Saran

Adapun saran dari hasil kajian ini adalah:

- 1) Pemerintah daerah kab/kota diharapkan melakukan pemetaan yang tepat terhadap keunggulan daerah masing-masing. Selanjutnya dilakukan konsentrasi kebijakan dan pengeluaran daerah untuk sektor unggulan yang telah ditetapkan.

Hal ini diharapkan mampu meningkatkan PDRB daerah tersebut.

- 2) Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan dan mengembangkan kerjasama pembangunan antar daerah, terutama daerah-daerah yang mempunyai fungsi kawasan yang sama, untuk saling menemukan dan menunjang sumber-sumber pertumbuhan sektor ekonomi. Dibutuhkan penguatan forum-forum kerjasama antar daerah kab/kota untuk merumuskan arah pembangunan yang saling terintegrasi antar daerah.
- 3) Pemerintah diharapkan segera membangun industri pengolahan dibidang agrobisnis yang saling menunjang satu sama lain sesuai dengan tipologi dan potensi daerah.
- 4) Pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya mendorong investasi untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan memobilisasi kemitraan dengan dunia usaha.
- 5) Sebagai upaya menstimulus pembangunan daerah, maka perlu dipertimbangkan Revisi Qanun (Perda) tentang Pengelolaan dana Otsus, yaitu terkait dengan formulaasi besaran persentase pembagian dana otsus ke kab/kota dan mekanisme transfer, serta kewenangan pengelolaannya di kab/kota.

KEPUSTAKAAN

Arsyad. Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.

BPS Provinsi Aceh 2005-2010. *Buku Aceh Dalam Angka Tahun 2005-2010*.

_____, *Produk Domestik Regional Bruto Kab dan Kota 2005-2010*

Bank Dunia, 2006, *Analisis Pengeluaran Publik Aceh-Pengeluaran Untuk Rekonstruksi Dan Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta

_____, 2008, *Kajian Kemiskinan Di Aceh Tahun 2008; Dampak Konflik, Tsunami, dan Rekonstruksi Terhadap Kemiskinan Di Aceh*.

Jhingan. ML. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara; Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III-Samarinda, 2005, *Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Wilayah Kalimantan*. Samarinda

_____, 2012. Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Aceh, "Keseimbangan Pembangunan Daerah Kab/Kota di Aceh"

UNDP, 2010, *Laporan Pembangunan Manusia Aceh Tahun 2010*

Thee Kian Wie, 1982, *Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta : Pustaka Jaya.

Todaro, M.P, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I, Edisi Kedelapan. Erlangga, Jakarta.

Rahmaddin MY, 2009. "Indikator Pembangunan Daerah. <http://ovalhanif.wordpress.com/2009/04/21/indikator-pembangunan-daerah/>. Akses pada tanggal 24 Januari 2012.